



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN HIDAYAT
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 1000856

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.100.000.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 40.800.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
14.800.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 13.613.459

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.154.413.459

III. HUTANG

Rp. 35.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.119.413.459



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.